

RP300 JUTA TABUNGAN NASABAH RAIB, BANK KALTIMTARA DIGUGAT

Pihak BPD Sebut Rekening Korban Dibobol Hacker

KUTIM - Seorang nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara kehilangan dana sebesar Rp300 Juta di rekeningnya. Nasabah itu pun menggugat pihak Bank untuk melakukan ganti rugi atas raibnya dana nasabah tersebut.

Pengacara nasabah, Lucas Himuq mengungkapkan kliennya menempuh langkah gugatan karena sudah dilakukan mediasi antara kliennya dengan pihak BPD Kaltimtara.

■ Bersambung ke Hal. 11



NAHAS WARGA BINAAN LAPAS BONTANG TEWAS DENGAN BADAN PENUH LUKA



KAPOLRES Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, didampingi Kasatreskrim Polres Bontang, AKP Hari Suprpto (dok: agu/katakaltim)

KUTIM - BONTANG - Seorang warga binaan Lapas Bontang meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan. Korban inisial D, warga Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada 10 Maret 2025 di rumah sakit umum Taman Husada, Kota Bontang. Polres Bontang saat ini telah memeriksa sebanyak 10 saksi

■ Bersambung ke Hal. 11

SOSOK

Endar Priantoro Bekas Dirdik KPK Jadi Kapolda Kaltim

Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro menjadi salah satu perwira tinggi Polri yang masuk daftar mutasi pada Maret 2025.

Berdasarkan Surat Telegram nomor ST/488/III/KEP./2025 yang diterbitkan pada Kamis, 13 Maret 2025, Endar ditugaskan menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, ia adalah Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Dirdik KPK).

■ Bersambung ke Hal. 11

- NAMA : Irjen Pol. Endar Priantoro, S.IK
- TTL : Banyumas, 30 Juni 1973
- ALAMAT : Balikpapan, Kalimantan Timur
- AGAMA : Islam
- JABATAN : Kapolda KALTIM
- PENDIDIKAN : AKPOL (1994)
- RIWAYAT PEKERJAAN :
 - Pamapta Poltabes Palembang Polda Sumsel (1995)
 - Kanit Resintel Sekta 1 Poltabes Palembang (1996)
 - Kapolsek Lempung Polres OKI Polda Sumsel (1997)
 - Kapolsek Lubuk Linggau Timur Polres Mura (1998)
 - Kasat Bimmas Polres Bangka Polda Sumsel (1999)
 - Kapolsekif Prabumulih Polres Muara Enim Polda Sumsel (2000)
 - Kanit C Sat II/Pidsus Ditreskrim Polda DIY (2002)
 - Penyidik PD KPK (Tumpang Rawat Denmabes Polri) (2006)
 - Penyidik PD KPK Yanma Polri (2008)
 - Analisis kebijakan Muda Ditreskrimsus Polda Jatim (Bidang Tipikor) (2011)
 - Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jatim (2011)
 - Kapolres Bangkalan Polda Jatim (2012)
 - Kapolres Probolinggo Polda Jatim (2013)
 - Wadireskrimsus Polda Jateng (2014)
 - Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri (2017)
 - Analisis Kebijakan Madya Bareskrim Polri Bidang Pidkor (2018)
 - Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2019)
 - Direktur Penyelidikan KPK (2020—2025)
 - Kapolda Kalimantan Timur (2025—Sekarang)



Inspirasi



...Semakin kau tahu tentang jati diri dan sesuatu yang kau inginkan, semakin sedikit pula kau membiarkan berbagai hal yang membuatmu kesal berlatu...

Stephanie Perkins
Penulis Asal Amerika

e-Paper

koran.katakaltim.com



Ketika Nelayan Menang Melawan Menteri

JAKARTA - Angin segar menyambar telinga para nelayan di Kota Balikpapan. Nelayan yang tergabung di Kelompok Kerja Pesisir memenangkan gugatan di PTUN Jakarta melawan Menteri Perhubungan, Jumat 14 Maret 2025.



KOALISI nelayan pesisir Balikpapan usai putusan di PTUN, Jakarta 14 Maret 2025. (dok: Pokja Nelayan)

Pokja Pesisir telah menggugat keputusan Menteri Perhubungan RI, KM.54/2023, tentang penetapan lokasi wilayah tertentu di perairan luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang berfungsi sebagai pelabuhan di perairan Balikpapan.

Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM.54, tahun 2023 tersebut dikeluarkan pada 8 juni 2023. Rencana lokasi yang akan dipakai sebagai STS (Ship To Ship) atau alih muat (batu bara) dari tongkang ke kapal induk/mothervessel

■ Bersambung ke Hal. 11

SAMARINDA

DISPERINDAG SAMARINDA
TEMUKAN MINYAK

■ HALAMAN 3

BONTANG

PASIEAN BPJS
KESEHATAN DI RSUD

■ HALAMAN 4

POLITIK

PKS 'SETIR' KUTIM
DPRD GARANSI

■ HALAMAN 9

BERAU-PPU-PASER

DISNAKERTRANS
PPU: PERUSAHAAN

■ HALAMAN 12

SATGAS PANGAN BALIKPAPAN TEMUKAN MINYAK GORENG TAK SESUAI TAKARAN

BALIKPAPAN - Tim Gabungan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kaltim menemukan minyak goreng yang tidak sesuai takaran saat Inspeksi Mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Kota Balikpapan. Tim ini terdiri dari Subdit I Indagsi Ditkrimsus Polda Kaltim bersama Disperindagkop Kaltim dan Disdag Balikpapan.

“Kami mengambil 10 sampel untuk Minyak Kita dan ditemukan ada kekurangan takaran,” ujar, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Muhammad Anwar, Kamis (13/3/2025).

Anwar menambahkan, temuan tersebut ditemukan di salah satu ruko yang terletak di Kawasan Pasar Pandan Sari, Balikpapan Barat, saat digelar sidak gabungan Satgas Pangan. Tim Gabungan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kaltim

“Bila kemarin dari Satgas Pangan Polda Kaltim yang melakukan pengecekan di dalam pasar dan tidak ditemukan, maka hari ini kami Satgas gabungan melakukan pengecekan di ruko yang ada di luar,” ucapnya.

Menurutnya dari 10 sampel yang di ambil, katanya, ditemu-



SIDAK Minyakita di Balikpapan. (dok: hlm/katakaltim)

kan kekurangannya itu mencapai lebih dari 20 mililiter, artinya takaran minyak itu tidak 1 liter atau 1000 mililiter, yakni di bawah 980 mililiter.

Anwar menjelaskan, dalam peneraan ulang produk Minyak Kita tersebut, memiliki batas toleransi bila terjadi kekurangan yakni di bawah 15 mililiter. Dia menegaskan takaran itu berada

di batas toleransi dimana bila digambarkan untuk batas toleransi berada di 985 mililiter.

“Ada selisih 5 mililiter dari batas toleransi,” ungkapnya.

Dikemukakannya, untuk produk Minyak Kita yang takarannya kurang adalah merupakan kemasan baru, minyak goreng itu dikemas oleh CV Olindo Amanah Sejahtera dari Sidoarjo, Jawa Timur. “Ini

baru kami temukan, biasanya dari Sinarmas dan itu juga kami uji tera masih sesuai,” jelasnya.

Dari temuan itu, kata Anwar berikutnya akan disampaikan ke tim gabungan untuk ditindak lanjuti, akan digelar rapat pada sore ini yang dipimpin Disperindagkop serta Polda Kaltim dan dinas terkait lainnya.

“Setelah rapat itu baru bisa di-

tentukan seperti apa tindak lanjut berikutnya,” ungkapnya.

Dari hasil rapat tersebut, kata Anwar tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penarikan untuk produk yang memiliki takaran kurang hingga diambang batas toleransi.

“Kemungkinan penarikan itu pasti ada, tapi yang jelas itu masih menunggu hasil rapat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kasubdit I Indagsi Polda Kaltim, AKBP Haris Kurniawan menyampaikan takaran Minyak Kita kini tengah menjadi isuhangatakibatditemukanproduk tersebut yang tidak sesuai takaran.

“Oleh sebab itu sejak kemarin kami bersama Polres jajaran melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional,” kata Haris. (Hilman)

Pemerintahan Rudy-Seno Fokus Pembangunan Ekonomi Desa

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus fokus pada pembangunan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya mempercepat kemajuan daerah.

Pembangunan ekonomi desa adalah prioritas yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim (DPMPD Kaltim), Puguh Harjanto kepada wartawan.

Menurutnya, Pemprov sangat berkomitmen dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi di desa-desa, yang menjadi bagian dari visi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Pemprov memiliki berbagai program unggulan yang bertujuan menjadikan Kaltim sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif. Salah satu fokus utama dari program ini adalah pengembangan kawasan desa dengan berbasis pada industrialisasi komoditas unggulan daerah.

Puguh Harjanto menjelaskan bahwa upaya ini sudah mulai berjalan, tetapi perlu ada akselerasi yang lebih cepat agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat.

“Program unggulan ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Kaltim sebagai

pusat ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal. Kami menyadari bahwa desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi daerah, dan melalui program ini, kami berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” ujar Puguh Harjanto.

Selain itu, Puguh menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga pada sinergi dengan masyarakat desa dan sektor swasta. Untuk itu, berbagai program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi desa terus digencarkan agar masyarakat dapat mengelola potensi lokal mereka dengan lebih baik dan mandiri. “Kami berharap desa-desa di Kaltim bisa berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui berbagai program unggulan tersebut, terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat desa dapat lebih sejahtera, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan Kaltim sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif dan berbasis pada potensi daerah yang ada. (*)



SITUASI tempat penjualan ayam di pasar Induk Sangatta. (dok: caca/katakaltim)

LAPAK PEDAGANG AYAM BANYAK KOSONG DI PASAR INDUK SANGATTA

KUTIM — Lapak pedagang ayam di Pasar Induk Sangatta banyak yang kosong, Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar Induk Sangatta, meminta para pedagang memaksimalkan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Kalau ada teman-teman yang mau masuk, bisa kita terima. Karena masih banyak kosong di ayam, di zona sembako juga

masih ada,” terang Kepala Tata Usaha UPT Pasar Induk Sangatta, Ali Yusuf kepada Katakaltim, Selasa 11 Maret 2025.

Sementara untuk lapak sayuran, ikan dan daging, dikatakannya sebagai lapak yang kuotanya sudah memenuhi.

Menanggapi keluhan yang kerap disampaikan para pedagang Pasar Induk, terkait banyaknya pedagang emperan di pinggir

jalan yang dianggap merugikan. Ali Yusuf meminta agar OPD terkait dapat segera mengatasi keresahan tersebut.

“Kami hanya membawahi wilayah sini (Pasar Induk), di luar itu bukan wewenang kami, mungkin dinas terkait bisa menindaklanjuti terkait ketertiban umumnya juga izinnnya,” jelasnya. (Caca)

● **BANNER**

Halaman Utama 7 x 45 mmk (FC) Rp. 10.000.000/Terbit
Halaman Dalam 7 x 45 mmk (FC) Rp. 5.000.000/Terbit

● **ADVETORIAL**

Full Colour Rp. 30.000.000/1 halaman /Terbit
Halaman Utama Rp. 15.000.000/Setengah Halaman/Terbit
Rp. 7.500.000/Seperempat Halaman/Terbit

Full Color Rp. 20.000.000/1 Halaman/Terbit
Halaman Dalam Rp. 10.000.000/Setengah Halaman/Terbit
Rp. 5.000.000/Seperempat Halaman/Terbit

Black White Rp. 15.000.000/1 Halaman/Terbit
Halaman Dalam Rp. 7.500.000/Setengah Halaman/Terbit
Rp. 3.500.000/Seperempat Halaman/Terbit

● **DISPLAY**

Black White Rp. 50.000/MK/Terbit

DISPERINDAG SAMARINDA TEMUKAN MINYAK GORENG TAK SESUAI TAKARAN



DISPERINDAG Samarinda menemukan takaran Minyak Goreng merek Minyakita yang tak sesuai jumlah seharusnya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Senin 10 Maret 2025. (Dok: ali/katakaltim)

SAMARINDA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Samarinda melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di sejumlah titik pada Senin 10 Maret 2025.

Hasilnya mereka menemukan takaran Minyak Goreng (Migor) merek Minyakita yang tak sesuai jumlah seharusnya. Inspeksi dilakukan di beberapa pasar tradisional dan pertokoan dengan mengambil sampel kemasan botol dan refill (pouch) isi 1 dan 2 liter.

Hasilnya, ditemukan tiga pro-

duken yang tidak sesuai dalam penggunaan angka kuantitas di kemasan dan isi pada kemasan. Menurut Kadisperindag Samarinda, Nurrahmani, untuk hasil kebenaran kuantitas terdapat salah satu PT yang melanggar aturan.

"Kemasan botol isi bersih 1 liter terukur hanya berisi 970 ml, selisih

kurang 30ml," ucapnya kepada Katakaltim saat dikonfirmasi, Rabu 12 Maret 2025.

Temuan ini menyalahi ambang batas toleransi dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dimana batas kekurangan maksimal 15 ml. Metode pengujian dengan volumetrik menggunakan gelas ukur kapasitas 1 liter.

Kata Nurrahmani, pihaknya belum bisa bersikap tegas terkait temuan ini karena masih harus menunggu instruksi pusat. Meski

begitu, Nurrahmani mengatakan pihaknya akan bertemu Disperindag Provinsi Kaltim di Balikpapan.

Katanya akan membahas hasil temuan di lapangan beberapa daerah di Kaltim terkait Minyakita. Dari hasil pertemuan ini akan ada rekomendasi yang akan dijalankan Disperindag tingkat kabupaten/kota.

"Biasanya pasti ada rekomendasi dari kementerian, misalnya pederanya dari pasar, kita akan ikuti apa yang menjadi keputusan itu," pungkash Nurrahmani. (Ali)



KETUA Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana (Dok: agu/katakaltim)

22 Kali Kapal Tongkang Tabrak Jembatan

Badko HMI Desak Evaluasi Pihak Terkait

SAMARINDA - Insiden kapal tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam Satu kembali terjadi baru-baru ini. Peristiwa itu menambah daftar panjang kasus serupa. Berdasarkan catatan DPRD Kaltim, telah terjadi hingga 22 kali.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, pun angkat bicara. Dia menegaskan insiden berulang ini menunjukkan lemahnya pengawasan di jalur sungai. Untuk itu, Ashan meminta pihak yang bertanggung jawab segera dievaluasi.

Pihaknya, menyebut jembatan Mahakam Satu merupakan infrastruktur vital bagi masyarakat Samarinda dan Kaltim. Setiap insiden tabrakan tongkang berisiko besar terhadap konstruksi jembatan.

Ashan lebih jauh mengingatkan pemerintah tak boleh lupa bahwa Kaltim punya sejarah kelam. Yaitu runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2011 yang menelan puluhan korban jiwa.

"Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Jembatan Mahakam," ujar Ashan kepada awak media, Senin 10 Maret 2025.

Ia juga menyoroti peran Pelindo sebagai subholding kapal tunda dan jasa maritim. Mereka seharusnya memiliki kewenangan serta fasilitas untuk mencegah insiden ini.

"Ini bukan kelalaian biasa, ini sudah keterlaluhan dan harus disikapi dengan tegas demi keamanan dan keselamatan warga Kaltim," tegasnya.

Sebagai bentuk respons, HMI Badko Kaltim-Kaltara akan segera melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama DPRD Kaltim.

"Jika tidak ada tindakan tegas, termasuk pencopotan Kepala KSOP dan GM Pelindo Kota Samarinda, kami akan menggepung kantor Pemprov dan DPRD Provinsi Kaltim," tegasnya lagi.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar insiden serupa tidak terus berulang di masa mendatang. (Ali)

Ponpes Nabil Husain Dilalap Api

SAMARINDA - Kebakaran hebat melanda Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda Jalan Rapak Indah, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Rabu 12 Maret 2025, malam.

Si jago merah melalap bangunan tiga tingkat sesaat setelah waktu berbuka puasa. Meski begitu, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini.

Wakil Kepala Sekolah sekaligus Koordinator Keamanan Pesantren, Mistoyo (56), mengatakan gedung yang terbakar merupakan kantor Pesantren.

"Kronologis pastinya saya kurang tahu, tapi saya dapat info dari santri yang melihat langsung kejadian awal. Titik awal api dari lantai dua," ucapnya kepada katakaltim di



POTRET Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda Jl. Rapak Indah, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, saat api berhasil dipadamkan, Rabu (12/3/2025) malam. (Dok: ali/katakaltim)

lokasi kebakaran.

"Itu ruang guru, ada ruang kepala sekolah, mulai dari madrasah Diniyah, SMP, MTS, SMA dan SMK, jarak bangunan sekolah dengan titik

asal api agak jauh," sambungnya.

Awalnya, santri yang sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah merasakan hawa panas. Saat selesai sholat, santri melihat

api di gedung kantor dan langsung mendobrak pintu.

"Pas mereka masuk, sofa sudah terbakar, kemudian komputer di lantai tiga ada 40 unit habis terbakar," ujar Mistoyo.

Untuk dugaan awal, Mistoyo mengatakan kebakaran disebabkan konsleting listrik, karena saat kejadian, tidak ada aktivitas di gedung tersebut.

"Kayaknya ada konsleting listrik atau arus pendek, karena tidak ada penghuninya," terangnya.

Taksiran kerugian akibat kebakaran itu mencapai miliaran rupiah, karena terdapat banyak alat elektronik di gedung yang terbakar.

"Mungkin estimasi untuk sementara sekitar Rp1 miliar," pungkash Mistoyo. (Ali)

SAMARINDA - Puluhan anak muda berpartisipasi di Samarinda Book Party, event baca buku dengan suasana alam, pada Minggu (9/2/2025) di Taman Edu Park Samarinda.

Tak hanya baca buku dengan suasana alam bebas, para peserta membagikan hasil bacaan mereka secara bergiliran.

Metode ini membuat peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari hasil bacaannya, peserta juga menjadi tau hasil bacaan peserta lainnya.

Pada kegiatan ini, peserta tidak diwajibkan membawa jenis buku tertentu, peserta bebas membawa dan berbagi hasil bacaan dengan

genre apapun. Mulai dari sains, fiksi, hingga non fiksi.

Kegiatan menjadi lebih seru karena peserta saling bertanya jawab hasil bacaan, sehingga menambah pengetahuan dari genre lain, pun pembahasan menjadi lebih dalam. Meski didominasi anak muda, kegiatan ini terbuka untuk segala kalangan.

Berdasarkan pengamatan Katakaltim, peserta yang hadir pun dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Wakil Perencanaan Kegiatan, Nabil (18), mengatakan ada yang berbeda dari Samarinda Book Party kali ini. Peserta tak hanya melakukan aktivitas membaca dan diskusi,

tapi membagikan takjil.

"Edisi minggu ini cukup berbeda. Sebelumnya hanya diisi kegiatan literasi dan games. Hari ini peserta juga berbagi takjil," ucapnya kepada Katakaltim usai kegiatan.

Kata Nabil, lokasi Samarinda Book Party kali ini sangat tepat. Mengingat sebelum berubah nama menjadi Edu Park, tempat ini bernama Taman Cerdas. Sehingga sangat pas, taman dengan branding pengetahuan diisi kegiatan yang dapat mengasah dan menambah pengetahuan.

"Karena Samarinda Book Party ini fokusnya di literasi kan, jadi cocoklah dengan tempatnya," pungkashnya. (Ali)



SAMARINDA Book Party, event baca buku dengan suasana alam, pada Minggu (9/2/2025) di Taman Edu Park Samarinda. (Dok: ali/katakaltim)



RS TAMAN HUSADA Bontang (Dok: ali/katakaltim)

Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Taman Husada Wajib Daftar Online

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang mengumumkan kebijakan baru terkait pelayanan Poliklinik Rawat Jalan bagi pasien BPJS Kesehatan, Jumat 7 Maret 2025.

Direktur RSUD Taman Husada, dr. Suhardi, mengatakan mulai 20 Maret 2025, pasien BPJS wajib mendaftar antrean secara online melalui aplikasi Mobile JKN sebelum berobat. "Kecuali untuk Klinik Bedah Onkologi," ucapnya kepada katalakaltim, Sabtu 8 Maret 2025. Ia menjelaskan aturan ini

bertujuan mempermudah pasien mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengantri lama di rumah sakit.

"Jadi pasien bisa pilih kedatangan sesuai jadwal yang tersedia, sehingga proses pelayanan lebih tertata," ucapnya.

Perubahan ini juga mencakup penerapan sistem Cluster untuk

seluruh layanan poliklinik, kecuali Klinik Anestesi. Katanya, sistem Cluster ini membagi pelayanan klinik menjadi beberapa kelompok jam pelayanan.

Saat mendaftar online, pasien akan mendapat nomor reservasi dan informasi waktu check-in. Kemudian pasien harus datang ke rumah sakit untuk check-in di Anjungan SIPERI atau loket pendaftaran sesuai waktu yang ditentukan.

"Kalau tidak dengan waktu yang ditentukan, maka check-in

belum dapat dilakukan dan belum dapat dilayani," terangnya.

Tujuan sistem ini untuk meminimalisir waktu tunggu dan memberikan pengalaman berobat yang lebih efisien. "Supaya lebih terorganisir dan nyaman bagi semua pasien," katanya.

Pastikan Anda telah mengunduh dan mendaftar di aplikasi Mobile JKN sebelum tanggal tersebut. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui nomor 081545600006. (Ali)

NENI TEKANKAN PENTINGNYA AKULTURASI BUDAYA



WALI KOTA Bontang Neni Moerniaeni berkunjung Balai Wantilan Pura Buana, Salebba Bontang Minggu 9 Maret 2025 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 (dok: prokompim)

BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan pentingnya akulturasi budaya di tengah keragaman masyarakat.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam agenda Donor Darah, Bakti Sosial, dan Seminar Kesehatan menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, Minggu 9 Maret 2025, di Balai Wantilan Pura Buana, Salebba Bontang.

"Bontang adalah kota dengan keberagaman suku, agama, dan ras. Tapi, justru dalam perbedaan ini kita bisa menemukan keindahan apabila kita saling menghormati dan menjaga harmoni serta toleransi," ucapnya.

Neni juga menyoroti program Pemkot Bontang dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk upaya penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurutnya, tren KDRT di Indonesia meningkat 10 persen, termasuk di Bontang. Olehnya, ia mengajak semua pihak, termasuk pemuka agama dan organisasi masyarakat, bersama-sama mengatasi persoalan ini.

"Kita memiliki berbagai elemen yang bisa bersinergi, seperti gerakan keluarga sakinah, peran pemuka agama, dan tokoh masyarakat," katanya.

"Kita harus berupaya menekan angka KDRT dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga," sambungnya.

Selain itu, Neni juga menyungguh meningkatkan jumlah penduduk Kota Bontang yang kini mencapai 191 ribu jiwa.

Ia menilai migrasi ke Bontang yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam sektor ketenagakerjaan dan ekonomi. Karena itu, ia menegaskan pentingnya transformasi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan Bontang.

"Sebagai kota yang maju dan berkelanjutan," jelasnya.

Lebih lanjut, Neni berharap PHDI Bontang dapat turut berkontribusi membangun kota dengan melestarikan budaya dan lingkungan. Ia mengusulkan agar Pura Buana dapat menjadi destinasi bagi tamu pemerintah kota.

Artinya, tidak hanya menunjukkan keberagaman dan toleransi di Bontang, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM.

"Ketika tamu pemerintah kota berkunjung ke sini, kita bisa menampilkan hasil kerajinan tangan dan produk UMKM lokal, sehingga ada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," tuturnya.

Sebagai penutup, Neni mengucapkan selamat menyambut Hari Suci Nyepi kepada umat Hindu di Bontang dan mengajak seluruh masyarakat terus menjaga semangat kebersamaan, toleransi, serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan bersama.

Acara turut dihadiri Ketua Paripada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bontang, I Wayan Santika, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Bontang, Ida Ayu Sugiartini, serta para tokoh agama dan tamu undangan. (Rls)

SATPOL PP BERI SANKSI HOTEL NAKAL

BONTANG - Satpol PP Bontang memberikan teguran keras kepada pihak hotel yang mengizinkan pasangan bukan suami istri menginap di hotel, Kamis 13 Maret 2025.

Mereka ditegur setelah tim gabungan Satpol PP, Polres Bontang, Kodim 0908, dan Kemenag merazia beberapa hotel dan tempat hiburan malam.

Hasil razia menunjukkan beberapa hotel mengizinkan pasangan bukan suami istri menginap di hotel.

Kepala Satpol PP Kota Bontang, Ahmad Yani, melalui Kabid PPUD Arianto, mengatakan surat teguran sudah diberikan kepada hotel Akbar, Kelurahan Tanjung Laut, hotel Sanrego, Kelurahan Api-Api dan Homestay Berkah Jaya Loktuan.

Katanya surat itu sebatas pernyataan berdasar bukti dan fakta bahwa hotel telah mengizinkan pasangan bukan suami istri tinggal di hotel saat bulan suci Ramadan.

Jika ditemukan kembali pada pelanggaran yang sama, maka Satpol PP akan proses melalui



PIHAK Satpol PP Bontang memberikan surat teguran kepada pihak hotel. (Dok: yub/katakaltim)

teguran 1,2 dan 3.

"Dan selanjutnya dapat dilakukan penertiban dengan penyegelan sementara tempat usaha/hotel bersangkutan," tegasnya.

Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bontang, serta memastikan bahwa hotel-hotel di Kota Bontang menjalankan usaha mereka dengan baik dan benar.

Diketahui, pada razia gabungan ini mereka menangkap 5

pasangan bukan suami istri di dua hotel di Bontang. Kelima pasangan tersebut ditangkap di Hotel Akbar, Hotel Sanrego, dan Homestay Berkah Jaya Loktuan.

5 pasangan bukan suami istri yang ditangkap adalah I dan N di Hotel Sanrego, M dan R Hotel Akbar, AS dan KA Hotel Sanrego dan NA dan A laki-laki pasangan yang kabur saat dirazia. (Ayub)

KNPI: Perusahaan Wajib Dukung Pengentasan Kemiskinan

BONTANG - Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Bontang minta seluruh perusahaan di wilayah Bontang berperan aktif mendukung program 100 hari kerja Wali Kota.

"Khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem," tegas Ketua KNPI Bontang, Indra Wijaya kepada awak media, Rabu 12 Maret 2025.

Pasalnya, tandas Indra, perusahaan punya tanggung jawab dalam menghilangkan kesenjangan sosial. Program tersebut melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui agenda tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Di mana, tanggung jawab itu diatur dalam UU Perseroan Terbatas (PT) nomor 40 tahun 2007 dan peraturan industri.

"Kan ada penyaluran CSR yang bisa secara tepat sasaran dan sesuai regulasi," ucap Indra.

Selain itu, tambah Indra, kesejahteraan masyarakat menjadi

tanggung jawab bersama. Maka harusnya dapat diatasi melalui kolaborasi pemerintah dan pihak perusahaan.

"Kami minta seluruh perusahaan mengambil bagian dalam mendukung target Wali Kota, untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Bontang," tegas Indra.

Kota Bontang, dikenal sebagai kota industri yang di dalamnya bertandang 4 perusahaan raksasa seperti PT Pupuk Kaltim, PT Badak LNG, PT EUP, dan PT Indominco Mandiri. Indra menilai kehadiran perusahaan tersebut dapat menjadi support besar untuk menghilangkan kesenjangan sosial.

Untuk itu ia juga berharap Pemkot dapat membangun mekanisme lebih transparan dan terarah dalam penyaluran dana TJSL. Agar manfaatnya dapat dirasakan betul oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kota yang dikenal sebagai kota industri sangat lucu jika masih ada kemiskinan ekstrem," tutupnya. (Agu)



KETUA KNPI Bontang, Indra Wijaya (dok: agu/katakaltim)

Warga Keluhkan Bansos, Banjir Hingga Perbaiki Jalan

KUTIM — Puluhan Warga di Kelurahan Teluk Lingga, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadiri agenda serap aspirasi atau reses Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto pada Selasa 11 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, warga begitu antusias menyampaikan keluhannya. Mulai dari pemerataan bansos, penanganan banjir, keseriusan pemerintah terhadap posyandu, hingga perbaikan jalan beraspal untuk warga Teluk Lingga.

Ketua RT 45 Kelurahan Teluk Lingga, Nasruddin, mengeluhkan fenomena tidak meratanya bansos ke masyarakat.

“Kadang-kadang saya lihat yang dapat bansos itu bisa dialihkan ke yang tidak layak, bagaimana caranya ya itu dewan supaya itu tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa mendapat manfaat,” ujarnya.

Warga lainnya, yang juga menjadi pengurus Posyandu Teluk Lingga mengeluhkan, terkait keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan program posyandu seperti program makanan tambahan (PTM).

“Bisa dibilang posyandu ini

ujung tombak kesehatan masyarakat, tapi kadangkala kami yang korban kena ujung tombak itu,” jelasnya.

Ia menyebut, selama ini penyelenggaraan PTM ditalangi menggunakan dana pribadi.

“Jadi tolonglah, kami ini korban waktu, tenaga, materi juga. Kalau bisa ada support deh untuk PMT ini,” keluhnya.

Warga lebih jauh mengeluhkan masalah banjir yang terus menghantui warga Sangatta Utara, terlebih saat curah hujan yang tinggi. Mereka meminta agar pembangunan drainase untuk menangani banjir betul-betul diawasi.

“Sehingga memang layak kualitasnya, bukan sekadar formalitas menyerap anggaran, tapi masalah banjir belum juga teratasi,” paparnya.

Mereka bahkan menyoroti jalan di Gang Nusantara yang masih belum memuaskan.

“Kalau bisa diaspal, karena sekarang masih ada gundukan-gundukan bikin gak enak, bocor ban. Jadi kalau bisa juga diaspal seperti Margo Santoso,” ujar Ketua RT 41 Teluk Lingga.

Menanggapi banyaknya keluhan itu, Pandi Widiarto mengapresiasi keterbukaan dan kepercayaan masyarakat kepada dirinya untuk segera mengatasi aspirasi masyarakat.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim itu mengatakan terkait masalah bansos pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan verifikasi ulang.

Sementara untuk penanganan banjir di Sangatta Utara, DPRD Kutim dan Pemerintah tengah membahas kolam retensi baru.

“Semacam polder, yang rencananya di Gang Beringin belakang sana,” sebut Anggota Komisi C DPRD Kutim itu.

Dan, untuk keluhan masalah posyandu dan masalah jalan yang belum teraspal, Pandi meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki program unggul dalam semua bidang. Ia memastikan akan mengawal program tersebut hingga ke tingkat RT.



RESES Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, di Kelurahan Teluk Lingga Sangatta Utara (dok: caca/katakaltim)

“Karena kebetulan kami juga partai pengusung, Demokrat akan mengawal semua itu sehingga sampai di RT,” tandasnya.

Ia juga menyebut, semua aspirasi masyarakat yang diterimanya ini, direncanakan akan terlaksana pada Tahun Anggaran 2026.

“Kita usahakan di 2026, sementara kita susun. Tapi kalau memang bisa di tahun ini lebih bagus lagi,” jelasnya. (Caca)



RESES Anggota DPRD Kutim, Ahmad Sulaiman di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran (dok:ist)

WARGA SUSUK DALAM MINTA ALIRAN LISTRIK, PERBAIKAN JALAN DAN IRRIGASI

KUTIM – Legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ahmad Sulaiman, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat menggelar Reses di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran.

Masalah utama yang dikeluhkan warga adalah bendungan irigasi persawahan, infrastruktur jalan tani dan jalan desa, serta aliran listrik PLN yang hingga hari masih belum teraliri di desa tersebut.

Terkait bendungan irigasi untuk persawahan, masyarakat Desa Susuk masih mengandalkan pola lama, sehingga produktivitas pertanian kerap terhambat oleh kondisi cuaca.

“Masyarakat juga mengusulkan, adanya bendungan irigasi, persawahan karena selama ini, masih menggunakan pola lama, sawah tadah air hujan,” kata Sulaiman, kepada awak media, Selasa 11 Maret 2025.

Selain cuaca, produktivitas pertanian juga diperparah dengan

masalah mobilitas, lantaran akses jalan pertanian dan desa yang banyak mengalami kerusakan.

Selain itu, terkait masalah listrik di desa tersebut. Ia mengatakan selama ini warga hanya mengandalkan tenaga genset. Namun naasnya genset yang biasa di gunakan sudah dalam kondisi rusak.

“Warga berharap PLN segera masuk ke desa mereka agar bisa menikmati listrik secara permanen,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, pihaknya akan segera membawa usulan tersebut ke tingkat legislatif dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, terlebih permasalahan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

“Ini menjadi prioritas kami, agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan pembangunan yang merata,” tandasnya. (Caca)

Pemda Kutim Harap Masyarakat Luwu Bantu Kembangkan Daerah

KUTIM - Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar buka bersama di Masjid Agung Al-Faruq, Jumat 14 Maret 2025.

Ketua KKL Kutim Hasdawan, menyebut pihaknya terus menyambung dan mempererat silaturahmi masyarakat Luwu di Kutim dengan pertemuan-pertemuan KKL.

“Alhamdulillah ini ada puluhan orang yang hadir, kalau ditotal ada ribuan masyarakat Luwu di Kutim ini tapi terbagi di 18 kecamatan, jadi yang bisa hadir ini saja,” jelasnya.

Ia mengatakan, selain buka bersama, KKL juga tengah membahas agenda Halal Bihalal yang kemungkinan akan diselenggarakan di Luwu.

Sementara itu, Asisten III Setkab Kutim, Sudirman Latief, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), mengimbau masyarakat Luwu yang tinggal di Kutim ikut berkontribusi dalam pembangunan.

“Jadi kebersamaan kami di sini, yang juga menjadi salah



BUKA PUASA bersama KKL Kutim di Masjid Agung Al-Faruq.

satu paguyuban ormas di Kutim, tentu mengambil peran,” jelasnya kepada Katakaltim.

“Kami tentu sadar diri, bahwa meskipun kita ini pendatang dari sana, tapi warga KKL adalah

bagian dari masyarakat Kutim, jadi saling membantu dan mengambil peran di masing-masing bidang, menjadi tanggung jawab kita untuk Kutim,” tambahnya.

Ia mengaskan, imbauan terse-

but tidak hanya berlaku bagi KKL, sebagai salah satu pilar KKLR. Namun juga bagi pilar Kerukunan Keluarga Luwu Timur, Luwu Utara, dan juga Palopo. (Caca)

DPRD Kutim Kesal, Warga Sandaran Belum Nikmati Listrik dan Air Bersih

KUTIM - Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman kesal lantaran masyarakat di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sama sekali belum mendapat perhatian pemerintah terkait aliran listrik dan air.

“Sudah hampir 80 tahun Indonesia Merdeka belum pernah merasakan listrik, sementara mereka kalau harus memakai solar, dextrite, aduh harganya luar biasa,” kata Faizal, usai menggelar reses di Kecamatan Sandaran, Kamis 13 Maret 2025.

Karena itu, ia mendesak



RESES Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman di Kecamatan Sandaran, Kamis 13 Maret 2025 (dok: caca/katakaltim)

pemerintah segera merespons cepat masalah yang dianggapnya sudah sangat berlarut-larut.

Kecamatan Sandaran, merupakan wilayah usaha penye-

diaan tenaga listrik (Wilus) PT Kayan Hydro Energy (KHE), namun masyarakat Sandaran masih gelap tanpa listrik memadai.

“Jadi kalau bisa pemerintah bergerak cepat ke SDM, kalau bisa dicabut itu wilayah izinnya PT Kayan, biar PLN bisa masuk,” tegasnya.

Selain itu, masalah lain yang mengemuka pada hasil resesnya, adalah subsidi BBM dan LPG yang tidak pernah masyarakat terima.

Juga air bersih yang hingga hari ini belum mendapat perhatian pemerintah.

“Kalau bisa pemerintah juga segera membuat sistem pengelolaan air, agar masyarakat bisa menikmati air bersih,” tegasnya. (Caca)

KAPAL PONTON TABRAK KAFE DI TEPI SUNGAI MAHAKAM

KUKAR - Kapal TB Harmoni 58 yang menarik Ponton Lintas Samudera 137 menabrak sebuah angkeringan terapung di perairan Sungai Mahakam, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Insiden ini terjadi pada Jumat, 14 Maret 2025 sekitar pukul 09.00 Wita. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Kota Bangun, AKP Ribut mengatakan kapal TB Harmoni 58 melaju dari arah Samarinda menuju Desa Bunyut tepatnya di PT. Banpu, Kecamatan Muara Pahau, Kukar.

Setiba di TKP, tali ponton Lintas Samudera 137 yang

bermuatan Batu Palu tiba-tiba putus akibat arus sungai yang deras sehingga menabrak jamban langgar As-Sakirin lalu menabrak angkeringan.

"Ponton mundur dan menabrak jamban langgar As-Sakirin kemudian ponton melintang dan

menabrak Kafe Rindu River Angkringan milik Heriansyah di Desa, Kota Bangun Ulu, RT. 010 Kecamatan Kota Bangun,"

kata AKP Ribut dalam keterangan tertulisnya yang diterima Katakaltim, Jumat hari ini.

Kapal ponton tersebut baru

dapat dievakuasi setelah dilakukan tambat selama 30 menit. Dari insiden ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp60 juta rupiah.

"Jamban langgar As-Sakirin masih dalam verifikasi, dan Iyan juga masih dalam verifikasi kerugian," tandasnya. (Akbar)



KAPAL TB Harmoni 58 menarik Ponton Lintas Samudera 137 akhirnya menabrak sebuah angkeringan terapung di perairan Sungai Mahakam, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. (dok: akbar/katakaltim)



SEKERTARIS Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah di acara gerakan pangan murah. (Dok: Pemkab Kukar)

GERAKAN PANGAN MURAH

Upaya Pemkab Kukar Genjot Perekonomian Masyarakat

KUKAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggenjot perekonomian masyarakat lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman, Selasa, 11 Maret 2025.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan GPM merupakan solusi mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Saya berharap kita mampu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera dan berdaya," kata Sunggono dalam sambutannya saat membuka GPM secara resmi.

Sunggono menyebutkan bahwa menjaga ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini termasuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat," jelasnya.

Kata dia, kondisi faktual menunjukkan distribusi pangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan seperti rantai distribusi tidak efisien, ketidakcukupan pasokan di wilayah tertentu, variasi waktu panen, serta keterbatasan prasarana dan sarana transportasi, seringkali menjadi kendala mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Dampak dari hambatan ini fluktuasi pasokan dan harga pangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian baik bagi produsen maupun konsumen," ungkapnya.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pengendalian inflasi, yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi keterjangkauan pangan pokok dan strategis.

"Pemkab Kukar berupaya mengatasi dan mengurangi dampak inflasi

serta menstabilkan pasokan dan harga pangan melalui GPM yang kita laksanakan pada hari ini," sebutnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen.

"Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat, serta menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali, utamanya inflasi kelompok pangan," ucap Sunggono.

Untuk mencapai tujuan tersebut, GPM melibatkan berbagai pihak, antara lain Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, KTNA, KWT, Perum Bulog, PT. Rajawali Nusindo, petani, peternak, pembudidaya ikan, Bumdes, UMKM Pangan, serta Hiswana Migas.

"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kukar serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri atas dukungan dan sinergi yang baik dalam pelaksanaan acara ini," terangnya.

Melalui GPM ini, Pemkab menyediakan berbagai komoditas pangan pokok dan strategis seperti beras, gula, tepung terigu, telur ayam, daging ayam, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, ikan, sayuran, buah-buahan, serta olahan makanan dan minuman.

"Saya mendoakan semoga Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Kukar, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah," pungkasnya. (*)

Polsek Sebulu Sidak Pasar dan Toko Modern

KUKAR - Polsek Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pasar dan toko modern. Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas stok dan harga bahan pokok selama Ramadan, Rabu, 12 Maret 2025..

Adapun pasar dan toko sembako yang didatangi untuk dilakukan pengecekan antara lain, Pasar Desa Sebulu, Kecamatan Sebulu, Pasar Desa Sebulu Modern, Toko Sembako Leni Berkati Usaha dan Toko Sembako Hj. Rahmah, Desa Sebulu Ulu.

Kapolsek Sebulu, AKP Randy Anugrah Putranto mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan harga eceran tertinggi (HET) tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah.

"Kami melaksanakan pengecekan pasar terkait ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok (Bapok) serta stok sembako di wilayah hukum Kecamatan Sebulu," kata AKP Randy Anugrah Putranto kepada Katakaltim, Kamis, 13 Maret 2025.

Randy menyampaikan, dari hasil sidak yang dilakukan, terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Misalnya saja, beras, telur, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng.

"Harga sembako lainnya masih stabil dan tidak ada kenaikan yang berarti," ungkapnya.

Meski beberapa bahan pokok yang



KEPOLISIAN Sebulu mengecek bahan pokok di beberapa pasar dan toko modern di Kukar. (dok. Akbar/katakaltim).

mengalami kenaikan harga, masyarakat tetap diminta untuk tetap tenang. Sebab, kata Randy, stok dan kenaikan harga masih dalam level stabil.

"Untuk stok sembako di wilayah hukum Kecamatan Sebulu sampai dengan tahun raya Idul Fitri masih mencukupi," tegasnya

Selain itu, Kapolsek Sebulu juga menegaskan ke para pedagang agar tidak menimbun sembako. Jika kondisi ini ditemukan, masyarakat diminta segera melapor.

"Pemilik toko agar tidak menaikkan harga sembako terlalu tinggi kepada konsumen. Apabila terjadi gangguan Kamtibmas agar segera melaporkan ke kantor Polsek Sebulu," pungkasnya.

Diketahui, sidak tersebut melibatkan Sekertaris Camat (Sekcam) Sebulu, Buyung Sasmita, Kasi Trantib, Kuncoro, Kanit Reskrim Polsek Sebulu, Ipa Sainuddin, Kanit Intelkam, Aiptu Shofiyah, Kanit Samapta, Aiptu Syarifuddin, Koramil, Serka Saidil, Serka Eko Agus dan personil Polsek Sebulu. (Akbar)

Pembuatan SIM Baru di Polres Kukar Menurun Selama Ramadan

KUKAR — Jumlah pemohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru di Polres Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penurunan selama bulan Ramadan. Menurunnya permintaan pembuatan baru SIM terlihat dari jumlah pengajuan berkas dalam sehari.

Kasat Lantas Polres Kukar Iptu Ahmad Fandoli melalui Baur SIM Aiptu Gunawan mengatakan, pada hari biasanya, jumlah pemohon pembuatan SIM baru bisa mencapai sekitar 40 orang. Namun saat Ramadan, dalam sehari hanya sekitar 25 sampai 30 orang saja.

"Untuk jumlah pemohon SIM menurun dari bulan biasanya, apalagi beberapa hari ini cuaca pagi sering hujan," kata Aiptu Gunawan kepada Katakaltim, Rabu, 12 Maret 2025.

Gunawan menjelaskan, menurunnya permintaan pembuatan SIM baru diperkirakan sebagian masyarakat ada yang sudah mudik lebaran.

"Melihat pengalaman tahun yang lalu



SUASANA ruangan pembuatan SIM di Satlantas Polres Kukar. (Dok: akbar/katakaltim).

kondisi seperti ini masyarakat sudah banyak yang mudik keluar daerah," jelas Gunawan. Dia menambahkan bahwa pembuatan SIM dalam kategori baru itu akan meningkat

pada saat masa kelulusan pelajar. "Peningkatan biasanya pada saat kenaikan kelas dan kelulusan anak SMU," pungkasnya. (Akbar)



Heria Prisni
Kepala DP3AKB
Balikpapan

DP3AKB BALIKPAPAN PRIORITASKAN PENANGANAN STUNTING

BALIKPAPAN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AKB) Kota Balikpapan memprioritaskan penurunan prevalensi kasus stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Berdasarkan data, tercatat angka prevalensi stunting di Balikpapan mengalami kenaikan sejak 2023 mencapai angka 21,6 persen. Namun demikian angka ini masih lebih rendah dibanding prevalensi stunting provinsi dan setara angka nasional.

“Tapi ini merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir,” ujar, Kepala (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisni, Jumat (14/3/2025).

Sedangkan pada Oktober 2024, angka stunting di Balikpapan mencapai 14,68 persen, dimana jumlahnya meningkat dari September 2024 sebesar 13,8 persen.

target menekan angka kasus stunting dalam beberapa tahun terakhir selalu prioritas. Terlebih dengan terbitnya Perpres Nomor 73/2021 terkait percepatan penurunan stunting.

“Saat ini Kota Balikpapan telah memiliki 17 lokasi penanganan stunting,” ungkapnya.

Dimana ada berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap lokasi tersebut, mulai dari edukasi kepada remaja putri untuk konsumsi tablet tambah darah (TTD).

“Termasuk bimbingan kepada calon pengantin (catin), serta pemberian bantuan tunai bersyarat dan pangan nontunai kepada puskesmas. Dan ada sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, katanya, DP3AKB Balikpapan juga telah menggelar rebus stunting bersama OPD dan stakeholder terkait. Heria menjelaskan, berbagai poin kesepakatan penting untuk dilakukan bersama.

Pertama target prevalensi stunting di Balikpapan sebesar 17,6 persen pada 2025. Selanjutnya semakin rendah menjadi 15,6 persen pada 2026. “Target kunjungan bayi dan balita ke posyandu juga ditetapkan sebesar 95 persen,” tuturnya.

Kemudian tahun depan lokus penanganan stunting nantinya mencakup 34 kelurahan. Terakhir program dan kegiatan pendukung percepatan penurunan stunting akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2025. “Hasil dari rebus stunting selanjutnya akan diajukan kepada wali kota Balikpapan untuk disetujui,” tutupnya. (Hilman)



RAHMAD Mas'ud, Wali Kota Balikpapan (dok: hlm/katakaltim)

Rahmad Minta Dukungan Pemprov Kaltim Atasi Banjir

BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, menyoroti permasalahan penumpukan sampah pada sejumlah saluran pembuangan air atau drainase yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Balikpapan.

Hal ini Rahmad Mas'ud sampaikan usai salat subuh berjamaah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di Masjid Agung At Taqwa, Kota Balikpapan, Rabu 12 Maret 2025.

“Kita melihat bahwa setiap kali hujan turun, banyak sampah yang masuk ke saluran air. Ini menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di Balikpapan,” ujarnya.

Rahmad juga menekankan pent-

ingnya dukungan Pemprov Kaltim menangani permasalahan banjir di Kota Balikpapan ini agar lebih efektif. Ia berharap Pemprov Kaltim turut memperhatikan kondisi di Balikpapan. Terlebih lagi kota ini sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai kota yang berperan strategis mendukung pembangunan IKN, Balikpapan diharapkan mendapatkan perhatian lebih dalam

hal infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Rahmad juga menegaskan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat sangat diperlukan mengatasi masalah ini.

“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menjaga lingkungan yang lebih bersih dan mencegah banjir yang kerap terjadi,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menjelaskan pendekatan ini merupakan pengembangan sistem bank sampah yang telah diterapkan sebelumnya.

“Kalau sekarang ada kelompok

swadaya masyarakat. Kalau dulu kan bank sampah. Nah, untuk dua tahun ini kita membudayakan ke KSM di lingkungan,” jelasnya.

Sudirman mengakui penerapan KSM belum merata di seluruh wilayah Balikpapan karena masih dalam tahap sosialisasi. Sejauh ini, Kecamatan Balikpapan Kota menjadi wilayah yang hampir seluruh kelurahannya telah memiliki KSM, sementara daerah lain masih dalam proses penerapan.

“Sekarang belum merata. Jadi memang karena ini hal yang baru, baru ada beberapa kecamatan-kelurahan yang sudah melaksanakan,” ucapnya. (Hilman)

DPRD Apresiasi Bantuan Baznas untuk 2000 Mustahik

BALIKPAPAN - DPRD mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Balikpapan yang telah memberikan bantuan kepada 2000 orang mustahik dalam Program Ramadhan Bahagia (PRB). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa juga berkesempatan menyerahkan bantuan dari Baznas kepada perwakilan mustahik dari Balikpapan Timur.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam Program Ramadhan Bahagia ini. Mari kita sambut bulan suci dengan semangat kebersamaan, keberkahan, dan kepedulian sosial demi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Dikatakannya, sebanyak 2.000 mustahik ini menerima bantuan uang tunai masing-masing sebesar Rp500 ribu per orang. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menyambut bulan penuh berkah.



WAKIL Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa saat menghadiri pemberian bantuan kepada 2000 orang mustahik dalam Program Ramadhan Bahagia (PRB) Baznas Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu.

“Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saudara kita yang kurang beruntung. Harapannya, ke depan, semakin banyak yang mampu menjadi pemberi zakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Balikpapan, Abdul Rosyid Bustomi, menjelaskan bahwa setiap kecamatan menerima bantuan untuk sekitar 250 mustahik yang terdiri dari warga kurang mampu, termasuk janda tua.

“Jika tahun lalu bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako, tahun ini bantuan diberikan dalam bentuk uang

tunai agar lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan penerima,” ujarnya.

Bustami menambahkan, sebelum memberikan bantuan ini, sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Balikpapan untuk menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa paket sembako atau uang tunai.

“Saya sempat bertanya kepada Pak Wali, dan beliau setuju bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai lebih bermanfaat karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan lain,” jelasnya. (Hilman)

TP PKK Beri Bingkisan Kepada 102 Lansia

BALIKPAPAN - Tim Penggerak PKK Balikpapan bekerjasama dengan manajemen Hotel Blue Sky Balikpapan memberikan bantuan bingkisan kepada sebanyak 102 warga lanjut usia (Lansia) se Kota Balikpapan.

Bantuan bingkisan ini diserahkan Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud, SE, ME didampingi Ketua TP PKK Kota Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas'ud, SE di Balroom Hotel Blue Sky, Balikpapan, Jumat (14/3/2025).

Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud, SE, ME mengatakan, Pemkot Balikpapan memberikan apresiasi kepada TP PKK dan Manajemen Hotel Blue Sky Balikpapan yang telah peduli ke lansia di Balikpapan. Dimana kerjasama ini sudah dilaksanakan selama 4 tahun secara berturut-turut disetiap bulan suci ramadhan.

“Di dalam bulan suci ramadhan perbanyak kegiatan kegiatan yang baik, mudah-mudahan kegiatan ini menggerakkan hati untuk peduli sesama,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan juga mengajak para camat dan lurah. Untuk menyalurkan bantuan dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka saran dan kritik



WALI KOTA Balikpapan, H Rahmad Mas'ud, SE, ME didampingi Ketua TP PKK Kota Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas'ud, SE memberikan bantuan bingkisan kepada sebanyak 102 warga lanjut usia (Lansia) se Kota Balikpapan di Balroom Hotel Blue Sky, Balikpapan, Jumat (14/3/2025).

masyarakat.

“Kami yakin semakin banyak kita berikan bantuan di jamin tidak akan habis harta. Dan mudah-mudahan di bulan berkah ini, semua keinginan kita bisa di hijab Allah SWT,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Balikpapan, Hj. Nurlena Rahmad Mas'ud, SE mengatakan, santunan kepada lansia seluruh kecamatan Balikpapan ini setiap tahun dilaksanakan bersama Hotel Blue Sky.

“Alhamdulillah PKK Balikpapan bersama Hotel Blue Sky secara resmi sudah menyerahkan bantuan bingkisan kepada lansia. Kepada orang tua kita tercinta di Balikpapan sebanyak 102 bingkisan,” ujarnya.

Dikatakannya, TP PKK Balikpapan juga memberikan bantuan dana agar bisa bermanfaat bagi penerima.

“Diharapkan kedepan para lansia bisa semakin hidup sehat dan produktif,” tukasnya.

Menurut Nurlena, untuk pendataan lansia yang menerima bantuan ini, pihaknya melakukannya melalui kader-kader PKK yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

“Sebenarnya banyak lansia yang harus diberikan di Balikpapan, namun karena mampunya hanya 102 dari PKK. Dimana per kecamatan 3-4 lansia, yang mana tiap tahun diberikan secara bergantian. Tidak hanya itu-itu aja, tapi bergantian lansia yang menerima,” ujarnya. (Hilman)

POLRES KUKAR AMANKAN 20 GRAM SABU DI TANGAN SEORANG NELAYAN



PENGEDAR sabu-sabu (dok: akbar/katakaltim)

KUKAR - Seorang nelayan asal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditangkap polisi karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Nelayan tersebut berinisial AR (40) warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Anggana, Kukar. Dia dibekuk pada Senin, 10 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wita.

Kapolsek Anggana, AKP Akhmad Wira Taryudi mengatakan pihaknya menyita barang bukti sabu dengan berat 20,92 gram dari tangan pelaku.

Adapun rincian bukti yang diamankan antara lain 4 ball plastik poket ukuran sedang, 4 ball plastik poket ukuran kecil, 3 korek api merk tokai.

Kemudian 1 sedotan plastik yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 alat bong sabu yang terbuat dari botol Aqua yang terhubung dengan pipet kaca,

"Termasuk 1 handphone merk Vivo beserta uang tunai Rp1,1 juta lebih," ungkap AKP Akhmad dalam keterangan tertulis yang diterima Katakaltim, Kamis, 13 Maret 2025.

Kapolsek menjelaskan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah pelaku kerap terjadi transaksi jual-beli sabu.

"Mendapat informasi tersebut anggota unit Reskrim Polsek Anggana bergerak mencari informasi," katanya.

Setiba dilokasi, polisi melihat pelaku sedang duduk santai di dalam rumahnya. Salah satu petugas mendatangi pelaku dengan maksud menanyakan siapa nama pelaku.

"Saat itu ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di dalam rumah yang di informasikan setelah anggota unit Reskrim Polsek Anggana memasuki rumah tersebut dan bertanya, orang tersebut adalah AR," ucapnya.

Belakang diketahui, pelaku rupanya masuk dalam daftar Target Operasi (TO) di daerah tersebut. Polisi lalu menggeledah pelaku meski melakukan perlawanan.

"AR (yang merupakan TO didaerah tersebut) dilakukan pemeriksaan badan maupun rumahnya dan ditemukan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tergantung di dinding ruang tamu rumah," beber Kapolsek.

Usai digeledah dan ditemukan barang bukti, pelaku juga mengakui bahwa ada 1 poket sabu yang disimpan dalam kantong celana yang ia kenakan pada saat digerebek.

"Ia mengakui barang tersebut adalah miliknya untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Desa Muara Pantuan," terangnya.

Pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Anggana guna pemeriksaan lebih lanjut. (Akbar)

Polisi Tindaklanjuti Kasus Sopir Travel Lecehkan Penumpang

Pelaku Klaim Berdamai, Korban Mau AK Dihukum

SAMARINDA - Kasus dugaan pelecehan seksual oleh pengemudi kepada penumpang perempuan kini dalam proses penyelidikan Polresta Samarinda.

Penumpang tujuan Samarinda-Kutim itu mengaku telah dilecehkan oleh pengemudi inisial AK, tepat pada 01:40 WITA, Senin 10 Maret saat hendak menuju Sangatta, Kutim. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Kasi Humas Polres Kutim, Ramli Sianturi mengungkapkan kasus ini ditindaklanjuti pihaknya. Saat ini masih dalam tahap

penyelidikan untuk mendalami perkara.

"Ini masih dalam proses penyelidikan memang, masih tahap pengembangan," ucap Ramli saat ditemui di ruangannya, Jumat 14 Maret 2025.

Diketahui, awalnya korban meminta langganannya untuk mengantarnya ke Sangatta. Namun, langganannya memerintahkan kawannya menggantikan dia mengantarkan korban. Sopir travel langganannya pun sudah dimintai keterangan sebagai saksi. "Dari saksi sudah diperiksa," bebarnya.

Terkait penga-

kuan terduga pelaku yang sudah berdamai dengan korban, Ramli mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan berkomunikasi dengan Reskrim Polsek Sungai Kunjang.

"Saya akan komunikasi dengan Reskrim Sungai Kunjang, bahwa sudah ada pengakuan dari terduga pelaku kasus ini sudah damai, sedangkan korban dihubungi belum ada," pungkasnya.

Klaim Pelaku Berdamai, Korban Membantah

Pengemudi AK mengatakan bahwa dia dan korban sudah dimediasi dengan keluarga korban dan berujung damai. Katanya keluarga korban, baik ibu dan ayah korban, sudah legowo atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Mediasi itu dilakukan sehari setelah kejadian, tepat pada Selasa 11 Maret 2025.

"Kita sudah mediasi sama korban dan keluarganya.

Semua pihak ada di situ. Dan sudah damai.

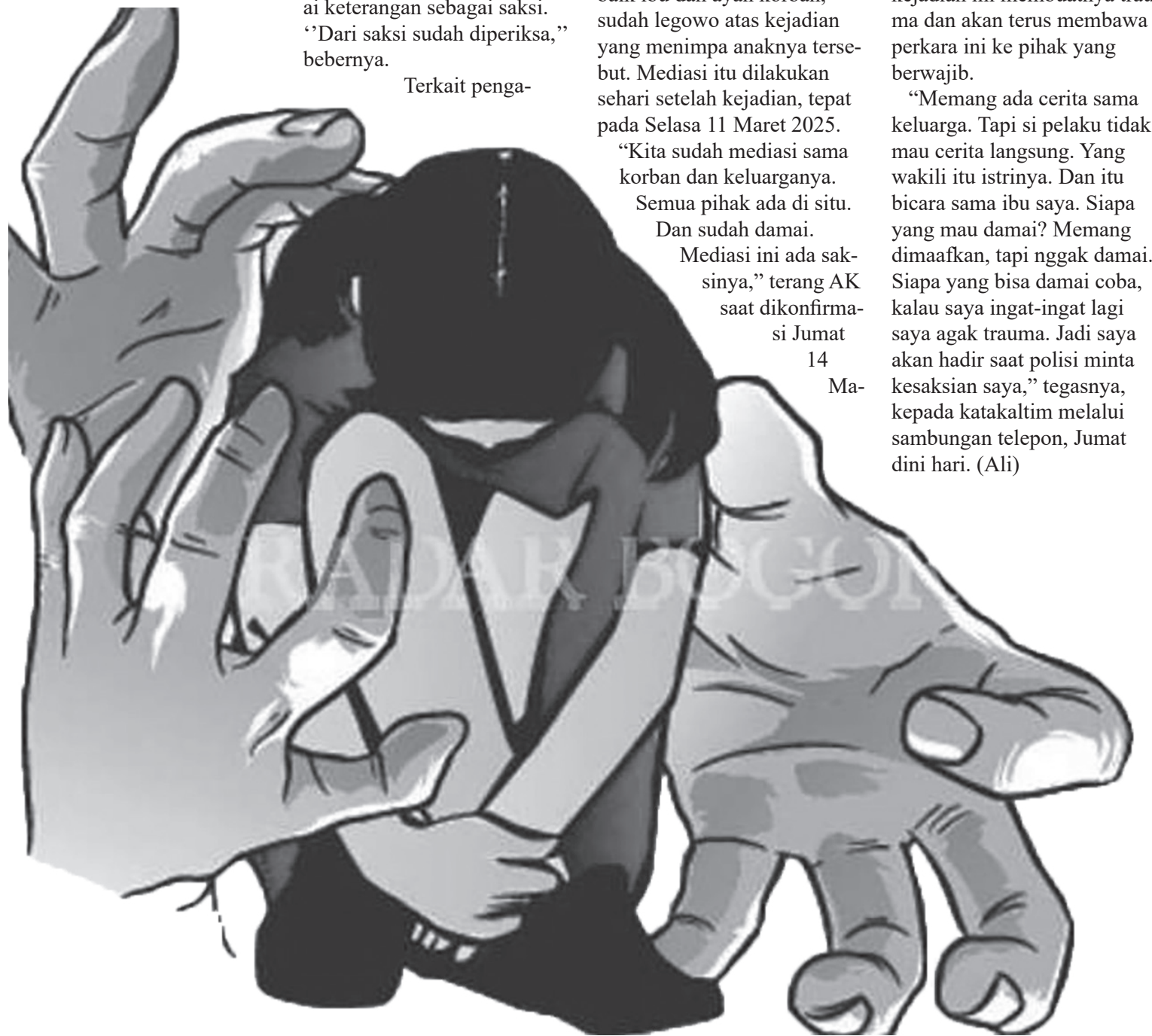
Mediasi ini ada saksi-sinya," terang AK saat dikonfirmasi Jumat 14 Ma-

ret, dini hari.

Dalam mediasi itu AK meminta maaf kepada korban serta keluarganya dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. "Kami memang salah, makanya kami ada pertanggungjawaban. Kami lakukan mediasi. Dan sudah clear semuanya," ujarnya.

Disisi lain, korban mengaku tidak ada damai antara kedua belah pihak. Kata korban, memang ada mediasi. Terduga pelaku melalui istrinya meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Hanya saja, korban masih tidak menerima perilaku yang menimpa dirinya. Ia mengaku kejadian ini membuatnya trauma dan akan terus membawa perkara ini ke pihak yang berwajib.

"Memang ada cerita sama keluarga. Tapi si pelaku tidak mau cerita langsung. Yang wakili itu istrinya. Dan itu bicara sama ibu saya. Siapa yang mau damai? Memang dimaafkan, tapi nggak damai. Siapa yang bisa damai coba, kalau saya ingat-ingat lagi saya agak trauma. Jadi saya akan hadir saat polisi minta kesaksian saya," tegasnya, kepada katakaltim melalui sambungan telepon, Jumat dini hari. (Ali)



Ayah Cabuli Anak Kandung Ditetapkan Tersangka

BALIKPAPAN — Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kaltim menetapkan ayah kandung korban pencabulan FR (29) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap balita 2 tahun warga Balikpapan.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, untuk motif tersangka FR melakukan aksi cabul terhadap anak kandungnya ini sendiri masih didalam penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kaltim.

"Penyidik menetapkan FR ayah korban sebagai tersangka setelah melalui rangkaian panjang penyelidikan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihaknya diantaranya dokter forensik, psikologi klinis dan asosiasi psikologi forensik," ujarnya, Selasa (11/3/2025).

Kemudian juga berdasarkan alat komunikasi kedua orang tua korban, yang dilakukan dari analisis percakapan alat komunikasi kedua belah pihak, sehingga dalam gelar disimpulkan tersangka adalah FR ayah korban.

Aksi yang dilakukan tersangka FR dengan memasukan jarinya ke alat kelamin korban sehingga mengakibatkan luka robek pada selaput dara korban. Yuliyanto menambahkan, kasus dugaan tindak pidana pencabulan ini dilaporkan orang tua korban pada bulan Oktober 2024. Dimana korban seorang anak balita yang masih berusia 2 tahun.

"Kami di Polda Kaltim akhirnya bisa mengungkap kasus ini dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun," jelasnya.

Diakuinya, tingkat kesulitan dalam pengungkapan kasus ini sangat banyak mengingat korban masih berusia 2 tahun. Akibat kesulitan ini, maka penanganannya kasusnya terkesan lamban.

"Padahal penyidik kami melakukan penyidikan ini secara marathon. Tidak ada istilah kendor, karena ini menjadi keprihatinan kami terhadap peristiwa yang merenggut masa depan anak. Dan kami dari Polda Kaltim sangat prihatin dengan peristiwa ini dan mudahan kedepan tidak ada lagi peristiwa serupa," jelasnya.



PENAHANAN tersangka pencabulan (dok: hlm/katakaltim)

Dikatakannya, dalam melakukan penyelidikan kasus ini, Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kaltim sudah melakukan 7 kali pertemuan diantaranya dengan psikologi klinis, asosiasi psikologi forensik, dan dokter forensik.

Kasubdit VI Renakta Ditreskrim Polda Kaltim, AKBP Rizath mengatakan, laporan kasus ini diterima 4 Oktober 2024 kemudian dilakukan penyelidikan dan lanjut penyidikan, dimana ada

sebanyak 5 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini juga dilakukan beberapa kali gelar perkara sebelum akhirnya ditetapkan tersangka inisial FR yang tidak lain adalah ayah kandung korban.

"Jadi saat kami terima laporan, korban pada hari itu juga dilakukan visum oleh dr forensik d RSUD Kanudjoso Djatiwibowo, Balikpapan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kerja sama dengan

Uptd PPA Balikpapan untuk dilakukan uji klinis sebanyak 7 kali assessment," jelasnya.

Untuk memperkuat hasil dari psikologi klinis, katanya, Polda Kaltim juga memohon kepada Kementerian PPA untuk melakukan uji forensik beserta para saksi dan pihak terkait.

"Setelah kami mendapatkan petunjuk dari dokter forensik dan psikologi forensik serta psikologi klinis kami lakukan penyitaan telpon genggam milik orang tua. Nah disana lah, kami temukan sejumlah petunjuk untuk mencari tersangka. Dan kami juga berkoordinasi dengan ahli hukum pidana umum dimana alat bukti kami gelarkan dan kami bisa naikan status menjadi tersangka," jelasnya.

Dokter Forensik RSUD Kanudjoso Djatiwibowo, dr Herry mengatakan, pemeriksaan terhadap pasien korban dilakukan pada tangga 4 Oktober 2024. Dimana, pasien datang di bawa orang tuanya dengan keluhan pada alat kelaminnya.

"Keluhannya saat ini nyeri

saat buang air kecil, dan saat dilakukan pemeriksaan ada ditemukan bercak merah di langit2mulut. Dan dari pemeriksaan ada robekan sebanyak 4 buah di slaput darah. Selain robekan lama, juga ada robekan masih baru, bisa di simpulkan ada suatu benda yang masuk ke dalam alat kelamin korban," jelasnya.

Sementara itu, Psikologi Klinis UPTD PPA Balikpapan, Vivi Damanik mengatakan, ada 7 kali assessment, dimana 2 dilakukan di renakta Polda Kaltim dan selanjutnya di UPTD ppa bersama 2 penyidik renakta.

"Dalam assessment, menggunakan 3 metode, 1 metode dengan menggunakan boneka edukasi milik UPTD PPA, Print Foto dan dari balik kaca yang dimana para calon tersangka diperlihatkan kepada korban yang berada di dalam kaca," tutupnya.

Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Perwakilan Asosiasi Psikologi Forensik, Lucia Pepi dan Kementerian PPA RI. (Hilman)

KUTIM - Dua pucuk kepemimpinan di Kutai Timur (Kutim), baik eksekutif maupun legislatif, dikomandoi oleh figur dari partai keadilan sejahtera atau PKS.

PKS memang partai politik yang punya basis massa kuat di wilayah dengan julukan "Tuah Untung Benua" itu. Hal tersebut tergambar dari perjalanan politik dan kemampuan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, membawa bendera PKS memimpin Kutim untuk yang kedua kalinya.

Ketua DPRD Kutim, saat ini satu partai dengan Bupati. Namanya adalah Jimmi. Dia melesat dari anggota menuju Ketua DPRD menggeser politisi PPP, Joni. Ardiansyah dan Jimmi memang dikenal sebagai kader

militan PKS, dan tentu saja punya peran strategis dalam menentukan perjalanan serta pembangunan daerah 5 tahun mendatang.

Jimmi, saat ditemui katakaltim menanyakan ihwal fungsi pengawasan yang dijalankannya sebagai wakil rakyat, mengaku akan tetap berjuang merespons kebijakan eksekutif. Menurut Jimmi, posisi DPRD yang dekat dengan

rakyat memungkinkan mereka merasakan langsung apa yang dirasakan oleh rakyat. "Jadi tentu apa yang dirasakan masyarakat itu juga dirasakan oleh wakil-wakilnya," katanya.

Di samping itu, ada kekhawatiran mengenai prinsip check and balance atau mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara keduanya. Beberapa pihak khawatir bahwa hubungan yang terlalu dekat antara eksekutif dan legislatif bisa saja mengganggu mekanisme ini.

Tapi, justru Jimmi membalik logika kekhawatiran tersebut. Ia mengatakan kedekatan Ketua DPRD dan Bupati justru lebih memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Sehingga pada

gilirannya keinginan rakyat dapat dikomunikasikan lebih efektif. Sebab itu, hubungan erat antara eksekutif dan legislatif bagi PKS justru dianggap memudahkan proses ini.

Bahkan menurut Jimmi, masyarakat tidak perlu khawatir akan minimnya pengawasan dewan terhadap pemegang kebijakan. Sebab, seperti diakui Jimmi, pihaknya sama sekali tidak memikirkan bagaimana cara merugikan rakyat. Sejalan dengan pikiran dewan, Bupati Kutim juga punya pandangan yang sama.

"Kami tidak sempat memikirkan itu untuk bagaimana merugikan masyarakat. Itu jauh dari pikiran kami. Saya kira sejalan pikiran kita dengan Bupati," pungkasnya. (Caca)

PKS 'SETIR' KUTIM

DPRD Garansi Fungsi Pengawasan Berjalan Baik



...Kami tidak sempat memikirkan itu untuk bagaimana merugikan masyarakat. Itu jauh dari pikiran kami. Saya kira sejalan pikiran kita dengan Bupati..."

Jimmi
Ketua DPRD Kutim



Ardiansyah Sulaiman dan Jimmi (dok: agu/katakaltim)

GELORA ANCAM PECAT KADER MEMBELOT

Wajib Menangkan Aulia-Rendi di PSU Pilkada Kukar

KUKAR — Sekretaris Partai Gelora Kukar, Aspin Anwar mengaku partainya akan memecat kader yang tak mendukung pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin di PSU

Pilkada Kukar.

Aspin menegaskan bahwa kader wajib mendukung kandidat yang diusung oleh partai. Kader pun diminta tunduk dan patuh.

"Tegak lurus terhadap perintah partai dengan pemberian rekomendasi kepada paslon Aulia-Rendi. Mulai dari ranting PAC-DPC wa -

jib hukumnya mendukung," kata Aspin Anwar kepada Katakaltim, Jumat, 14 Maret.

Meski demikian, Aspin mengaku tidak akan terburu-buru mengambil tindakan apabila ditemukan kader yang membelot.

"Yang penting jelas dan pasti pelanggarannya, tentu kita akan proses sesuai aturan partai," ucapnya.

Ia tak menampik kader di Kukar sangat solid. Dia juga meminta kepada kader supaya lebih massif sosialisasi. Langkah tersebut dinilai sangat efektif.

"Iya (efektif). Kita juga tunggu pergerakan lebih massif lagi" tandasnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kukar. Kemudian dilakukan pemungutan suara ulang.

Nama yang menggantikan Edi Damansyah adalah Aulia Rahman Basri yang kini berpasangan dengan Rendi Solihin. (Akbar)



Sekretaris Gelora Kukar, Aspin Anwar (dok: akbar/katakaltim)

BAWASLU KUKAR TEGASKAN BADAN ADHOC PILKADA 2024 TETAP LANJUT AWASI PSU

KUKAR - Bawaslu Kukar akan mengaktifkan kembali badan adhoc yang telah bertugas di Pilkada 2024, untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025.

Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo mengatakan, meski tidak ada perekrutan ulang, namun Bawaslu akan mengevaluasi kinerja mereka. Baik persyaratan administrasi maupun teknis pengawasan. Hal ini berdasarkan surat edaran Bawaslu RI.

"Untuk badan adhoc sifatnya pengaktifan kembali. Ada surat edarannya," kata Teguh Wibowo.

bowo kepada Katakaltim, Rabu 12 Maret 2025.

Teguh menjelaskan, dalam mengevaluasi, ada beberapa instrumen penilaian untuk menentukan kelayakan yang telah ditetapkan. Misalnya, apakah masih bersedia menjadi pengawas kecamatan (panwascam) atau tidak, dan syarat sebagai panwascam masih terpenuhi atau tidak.

"Jika memang sudah tidak memenuhi syarat lagi maka akan dibentuk yang baru," jelas Teguh.

Dia menyebutkan jadwal evaluasi badan adhoc dimulai pada 10 hingga 12

Maret hari ini. Sementara, penetapan kelayakan hasil evaluasi saat ini tengah digodok bidang divisi SDM.

Teguh Wibowo memastikan dalam Minggu ini hasil evaluasi seluruh badan adhoc akan diumumkan secara berjenjang.

"Dalam Minggu ini akan sudah ada hasilnya. Semuanya dilakukan evaluasi, untuk hasilnya disampaikan secara berjenjang, tidak bersamaan," terangnya.

Bawaslu Kukar pun menegaskan bakal mengawal secara ketat seluruh proses PSU pasca putusan MK. "Tentu Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap segala proses PSU pasca putusan MK," pungkasnya.

Diketahui, MK telah memutuskan untuk mendiskualifikasi petahana Edi Damansyah dan meminta wakilnya, Rendi Solihin untuk mencari pengganti Edi.

Saat ini yang bakal menggantikan Edi adalah seorang dokter. Namanya Aulia Rahman. Ia telah mendaftar di KPU Kukar untuk mengikuti PSU bersama 2 paslon lainnya. (Akbar)



Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo (dok: akbar/katakaltim)



RAMADHAN FEST PPU 2025: AJANG PROMOSI PRODUK LOKAL MENUJU PASAR GLOBAL

PENAJAM - Semarak Ramadhan Fest 2025 resmi dibuka di Kompleks Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Acara yang berlangsung 13-16 Maret ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten PPU, dan menjadi panggung bagi 260 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, Ramadhan Fest bukan hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat PPU.

“Ini

adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah,” ujarnya pada Jumat (14/3/2025).

Lebih lanjut, Raup Muin menekankan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan produk-produk lokal khas PPU, seperti makanan tradisional dan kerajinan tangan. Dengan semakin dikenalnya produk-produk ini, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik PPU sebagai destinasi wisata dan investasi.

“Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah kita menjadi peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia,” tambahnya.

Ramadhan Fest 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku UMKM.

Berbagai kegiatan pendukung, seperti pelatihan dan seminar, juga diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku UMKM.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka,” ngkanya.

Selain itu, Ramadhan Fest juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dari luar daerah. Berbagai pertunjukan seni dan budaya, serta kuliner khas PPU, disajikan untuk memanjakan para pengunjung.

Raup Muin berharap, kegiatan seperti Ramadhan Fest dapat diselenggarakan secara rutin, bahkan setiap bulan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan semakin seringnya kegiatan ini diadakan, semakin banyak pula peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka,” tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, Ramadhan Fest PPU 2025 diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan UMKM lokal, dan membawa produk-produk unggulan PPU ke panggung global. (ADV)



Raup Muin
Ketua DPRD PPU



DPRD PPU DUKUNG UMKM BENTUK KUB UNTUK PERMUDAH AKSES BANTUAN PEMERINTAH

PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna mempermudah akses terhadap berbagai program bantuan Pemerintah Daerah.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron saat diwawancara katalakaltim, Jumat (14/3/2025). Dikatakannya, KUB dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sebagai jembatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi, pendampingan, hingga bantuan modal yang disediakan pemerintah.

“Jika para pelaku usaha terorganisir dengan baik, maka akses ke berbagai program pemerintah akan lebih terbuka. KUB ini juga bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha,” kata Thohiron.

Ia menjelaskan, banyak program bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas

usaha, sehingga sulit mengakses bantuan tersebut.

“Mereka juga harus memiliki kelompok usaha bersama ini. Banyak program bantuan yang bisa dimanfaatkan, tetapi masyarakat kita masih banyak yang tidak mengurus izin usaha,” jelas Thohiron.

Ia berharap pembentukan KUB dapat mendorong kolaborasi antar

pelaku usaha dan memperkuat ekosistem UMKM di daerah yang berjuduk Benuo Taka itu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi lokal diharapkan bisa semakin berkembang dan meningkat.

“Kamiharap pelaku UMKM inisiatif dalam bersinergi antar pelaku UMKM dan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya. (ADV)



Thohiron
Ketua Komisi II DPRD PPU

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Mengucapkan

Selamat Hari Raya

Nyepi

29 - 30 MARET 2025

H. Syahrudin, M. Noor, SE, M.Si
Wakil Ketua DPRD

H. Muhammad Yusup, SH, MM
Wakil Ketua DPRD

Raup Muin
Ketua DPRD

Suhardi, S.IP, MM
Sekretaris Dewan

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MENGUCAPKAN

Selamat

HARI PERAWAT NASIONAL

KE-51

17 MARET 2025

H. Syahrudin, M. Noor, SE, M.Si
Wakil Ketua DPRD

H. Muhammad Yusup, SH, MM
Wakil Ketua DPRD

Raup Muin
Ketua DPRD

Suhardi, S.IP, MM
Sekretaris Dewan

Pemprov Kaltim Prioritaskan Pengembangan KKT



GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud melakukan kunjungan kerja ke Kaltim Kariangau Terminal (KKT) diterima Direktur Utama KKT Enriany Muis dan jajaran direksi lainnya, Balikpapan, Selasa (11/3/2025). (KKT)

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai aset strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana pengembangan ini akan dilakukan bekerja sama dengan PT Pelindo (Persero) dan ditargetkan dimulai pada tahun 2026. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuturkan, pengembangan utama yang akan dilakukan adalah perpanjangan dermaga dari 270 meter menjadi 1.000 meter.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan peti kemas, yang akan melayani kebutuhan pengiriman barang dan jasa di seluruh Kaltim, termasuk IKN. "Harapan kami, pertama, ini bisa dikembangkan, punya potensi, dan kita bicara dengan Pelindo, ada rencana untuk segera dikembangkan di tahun 2026 ini," ujar Rudy saat mengunjungi KKT,

Selasa (11/3/2025).

Inovasi Teknologi Kecerdasan Buatan China Menyalip AS Sejak Tahun 2017 Artikel Kompas.id Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltim, antara lain meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa yang diharapkan dapat menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga.

"Pada gilirannya, ketersediaan barang-barang konsumsi masyarakat akan lebih terjamin," ujarnya. KKT memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Dari total lahan 72,5 hektar, baru sekitar 16 hektar yang dimanfaatkan. Selain itu, terdapat pula aset Pemprov Kaltim seluas 300

hektar yang dapat dikembangkan untuk kegiatan kepelabuhanan. Alur pelayaran di KKT pun memungkinkan kapal-kapal besar untuk masuk, termasuk kapal dengan ukuran Panamax.

Selain pengembangan dermaga, Pemprov Kaltim juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju pelabuhan, yang telah menjadi jalan nasional. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan keamanan transportasi menuju pelabuhan.

"Saat ini jalan itu sudah menjadi jalan nasional, jadi tentunya kekurangannya mulai dari long-sornya jalan, amplasnya jalan, mesti harus ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)," jelas Rudy.

Dengan pengembangan ini, KKT diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang modern dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim dan pembangunan IKN. (*)

Nahas Warga Binaan ...

atas kasus dugaan pembunuhan warga Lapas Bontang. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, didampingi Kasatreskrim Polres Bontang, AKP Hari Suprpto, mengatakan sejumlah saksi termasuk teman korban dalam proses pemeriksaan. Pun demikian sampai saat ini polisi masih mendalami penyebab kematian korban.

"Kita sudah periksa 10 saksi. Termasuk teman 1 selnya dan petugas lapas. Nanti kita akan simpulkan dari keterangan-keterangan. Ini adalah penyelidikan tim. Jadi belum bisa kita up," terang Hari kepada katalim, di Mapolres Bontang, Kamis 13 Maret 2025.

Kapolres menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengungkap kasus ini. Dia menegaskan yang akan diperiksa dipastikan adalah mereka yang berkaitan langsung dengan korban. "Jadi keterangan yang kita peroleh nyata di lapangan," tukasnya.

Polres Bontang berjanji melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional untuk mengungkap fakta di balik kematian D.

Sementara itu, Pihak Lapas Kelas II A Bontang mengklarifikasi ihwal kematian D sehari setelah kabar meninggalnya di rumah sakit. Kepala Lapas Bontang, Suranto, mengaku penyebab kematian D sesuai surat keterangan dokter.

Dalam keterangan itu katanya almarhum punya penyakit tuberkulosis (TBC), gangguan hati, dan penyakit ginjal. "Penyebab kematian sesuai dengan surat keterangan dari dokter," katanya, Selasa 11 Maret 2025.

Almarhum sebelumnya menjalani hukuman di ruang isolasi sejak 22 Februari 2025 akibat pelanggaran tata tertib. Namun, karena kondisi kesehatannya menurun, ia harus dikeluarkan dan dirawat di klinik lapas sejak Minggu 9 Maret 2025.

Disisi lain, keluarga korban menduga kematian D bukan karena penyakit. Tapi dibunuh. Sebab keluarga D menyaksikan langsung adanya tanda-tanda penganiayaan. Seperti bengkak, berdarah di kepala, goresan-pungung belakang yang bengkak-biru, dan kaki berdarah. Keluarga almarhum pun mengharapkan penyelidikan transparan atas kasus ini.

"Keluarga saya cari keadilan untuk adek saya, semoga polisi bisa mengungkap," harap keluarga korban.

Keluarga almarhum mengakui ada kejanggalan dalam peristiwa ini. Sebab pihak Lapas Bontang tidak bersegera menginformasikan kematian D di rumah sakit.

Kuasa hukum keluarga D, Bahtiar mengaku bahkan Lapas Bontang tidak memberi informasi kepada pihak keluarga saat almarhum dibawa ke rumah sakit. Tindakan pihak Lapas Bontang

itu membuat Bahtiar curiga. Karena setelah beberapa jam, baru lah keluarga D diberi kabar ihwal kematiannya.

"Dikabari beberapa jam setelah (D) meninggal. Dari sini udah janggal. Kenapa lama diinformasikan?" cecar Bahtiar dalam konferensi persnya di Sangatta, Rabu 12 Maret, usai sholat tarawih.

Lebih jauh, setelah keluarga tiba di rumah sakit Taman Husada Bontang, almarhum sudah mau dinaikkan ke mobil jenazah untuk di bawa pulang. Tapi saat itu keluarga bersegera meminta agar tubuh almarhum diperiksa secara langsung.

Saat kain penutup dibuka, keluarga menemui banyak luka lebam dan memar pada tubuh almarhum. Menyaksikan fakta itu, keluarga meyakini ada tindakan pemukulan dan penyiksaan terhadap D. Bahkan pihak korban membeberkan pernyataan dokter yang mengaku adanya bekas atau tanda akibat benda tumpul ke tubuh D.

"Dokter yang menangani juga mengungkapkan luka memar ada akibat hantaman benda tumpul," ungkapny.

Lebih jauh Bahtiar mengutarakan bahwa keluarga D tidak pernah menyampaikan agar D tidak perlu divisum. Keluarga hanya tidak ingin dilakukan autopsi sebab bisa memakan waktu lama.

"Tapi kami tetap melakukan visum yang dibantu kepolisian," bebernya. (*)

Rp300 Juta Tabungan ...

Hanya saja mediasi itu tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak.

"Mediasi hasilnya buntu. Pihak bank beri solusi agar gugatan kita dicabut dan tidak minta ganti rugi," ungkap Lucas kepada awak media, di Sangatta, Kamis 13 Maret 2025.

Ia menyebut pihak BPD Kaltimara beralibi bahwa dana milik nasabah, CV Narayyan Gema Perkasa, hilang akibat phishing atau tindakan hacker.

Lucas membeberkan alasan tersebut tidak dapat diterima dan sangat merugikan nasabah. Sebab nasabah sudah memercayakan tergugat untuk menaruh uang di sana.

"Mereka tidak bisa lepas tanggung jawab dengan dalih hacker. Sama ajalah kita ini taruh uang kita di bank, siapapun pencurinya kan kita enggak tahu," jelasnya.

Lucas mengemukakan, dasar hukum gugatan adalah Pasal 29 POJK No.1/7/2013 yang menyebutkan; "Jika hilangnya dana nasabah disebabkan oleh kelalaian pihak bank digital, bank digital wajib mengganti kerugian nasabah."

Dan pada Pasal 38 huruf (C) POJK/1/7/2013 menyebutkan; "Jika hilangnya dana nasabah disebabkan oleh pihak ketiga, bank digital wajib memberikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi."

Selain kliennya, belakangan



PENGACARA korban (dok: caca/katakaltim)

muncul beberapa pihak yang juga mengaku kehilangan uang di BPD Kaltimara. Sayangnya, mereka mereka tidak tahu bagaimana cara mengadunya. Tidak hanya di Kutai Timur, nasabah di Samarinda juga jadi korban.

"Karena di dalam Bank Kaltimara itu ada sistem pengaduannya. Tapi prosesnya lambat, dan tidak pernah ada keputusan yang menguntungkan nasabah," bebernya.

Ia menyebut permintaan nasabah tidak muluk-muluk, hanya menginginkan agar dana yang hilang dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi dan pertanggung jawaban pihak tergugat.

"Kembalikan saja uang kami,

itu juga diakui kok sama bank kalau uang nasabah kami itu hilang," pintanya.

Selain itu, nasabah juga meminta ganti rugi immaterial, sebanyak Rp200 Juta. Artinya bank harus ganti rugi sebesar Rp500 Juta.

Sementara itu pengacara pihak BPD Kaltimara enggan berkommentar banyak saat ditemui.

"Nanti akan kami berikan jawaban dalam bentuk rilis ke media teman-teman media. Tapi sebelum itu kami akan kordinasi dengan pihak hukum dan humas BPD, apakah mereka mau mengeluarkan hak jawab," jelasnya. (Caca)

Bekas Dirdik KPK ...

Mutasi ini menjadi momen kembalinya Endar ke institusi Polri, setelah sempat ditugaskan di KPK selama hampir lima tahun, sejak April 2020 lalu. Endar Priantoro adalah perwira tinggi Polri yang lahir pada 30 Juni 1973 di Banyumas, Jawa Tengah.

Ia merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1994. Setelah lulus dari Akpol, dia malang melintang di berbagai jabatan di kepolisian. Pada 2011, Endar pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Dia lalu dipercaya menjadi Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Setelah setahun menjabat sebagai Kapolres Kapolres Bangkalan dan Kapolres Probolinggo pada 2013.

Setelah beberapa tahun bertu-

gas di Kepolisian Daerah, pada 2017 Endar ditarik Bareskrim Polri untuk menjadi Kasubdit IV Dittipkor Bareskrim. Kemudian pada 2019, dia ditunjuk sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, yang menjadi jabatan terakhirnya sebelum ber Kantor di KPK.

Pimpinan KPK sepakat memilih Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ia pun dilantik pada 14 April 2020. Selama bekerja di KPK, Endar pernah beberapa kali menangani kasus besar di lembaga antirasuah itu.

Misalnya kasus dugaan korupsi Formula E yang menjerat mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam menangani kasus itu, Endar menilai tidak ada cukup bukti untuk melanjutkannya ke tahap penyidikan. Selain

perkara di Jakarta, Endar juga menangani kasus suap proyek pemerintah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Endar pernah dibebaskan sementara dari tugas karena harus mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan XXIV Tahun Ajaran 2023 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dia mengikuti program itu bersama lima pegawai KPK lain sampai 10 Oktober 2023.

Sebagai Direktur Penyelidikan, Endar juga sempat dinonaktifkan oleh Ketua KPK kala itu, Firlil Bahuri. Meskipun begitu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kukuh untuk memperpanjang berkas penugasan Endar Priantoro di KPK. (*)

Ketika Nelayan ...

di tengah laut, berada di perairan Balikpapan, sekitar 8 mil dari muara sungai Manggar.

Padahal, berdasarkan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Kaltim Nomor 2 tahun 2021 yang diintegrasikan ke Perda RTRW Kalimantan, nomor 1 tahun 2023, bahwa kawasan tersebut merupakan zona perikanan tangkap.

Keputusan menteri perhubungan itu, selain tidak sesuai alokasi ruang pada Perda RTRW Kaltim, juga berpotensi menambah kerugian nelayan.

"Hal ini berdasarkan pengalaman yang selama ini dirasakan," ucap Direktur Eksekutif Pokja Pesisir, Mappaselle, dalam keterangan tertulis yang diterima katalim, Sabtu 15 Maret 2025.

Diketahui, sejak 2017 nelayan Balikpapan sering mengeluhkan aktivitas bongkar muat batu bara yang menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan semakin sempitnya wilayah tangkap nelayan.

Termasuk seringnya terjadi insiden tabrakan kapal nelayan dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir serta laut Balikpapan yang memiliki keaneka-ragaman hayati

yang tinggi.

Paling ironinya, ketika nelayan turun ke laut berharap dapat ikan untuk biaya hidup keluarga, tetapi begitu jaringnya diangkat, yang diperoleh malah batu bara.

"Hal inilah yang membuat nelayan Balikpapan pada tahun 2018 melakukan aksi blokade aktivitas bongkar muat batu bara di laut," ungkapnya.

Atas dasar itulah, akhirnya Pokja Pesisir yang didukung oleh WALHI dan Masyarakat Nelayan Balikpapan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menggugat Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.

Gugatan Pokja Pesisir didaftarkan sejak 10 Oktober 2024 dan te-registrasi dengan nomor perkara 367/G/2024/PTUN.JKT. Perkara itu mulai disidangkan pada 7 November 2024 dan pembacaan putusan pada 14 Maret 2025. Proses persidangan berlangsung selama 5 bulan.

Atas putusan yang dibacakan PTUN Jakarta pada 14 Maret 2025 tersebut, Pokja Pesisir dan Nelayan Balikpapan sangat bersyukur.

"Ini sebagai langkah awal un-

tuk memperoleh keadilan ruang yang menjadi syarat utama agar nelayan bisa sejahtera," jelasnya.

Kemenangan Nelayan Sementara itu Husen, selaku Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Pokja Pesisir menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat nelayan.

Khususnya nelayan di Teluk Balikpapan maupun di pesisir Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang selama ini berjuang memperoleh keadilan ruang di laut.

"Kita harap ke depan aktivitas bongkar muat di zona tangkapan nelayan tidak ada lagi, sehingga laut kita kembali bersih dan lestari," ucapnya.

Putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Pokja Pesisir ini disambut haru oleh Nelayan Balikpapan.

Fadlan selaku ketua GANEBA (Gabungan Nelayan Balikpapan) menyampaikan dirinya sangat bersyukur mendengar kabar ini.

"Saya sangat gembira dan terharu mendengar putusan tersebut, semoga nelayan bisa terus dapat keadilan," harunya. (*)



Sariman
Sekretaris
Komisi III DPRD
Penajam Paser
Utara (PPU).

Fasilitas Kesehatan Harus Jadi Prioritas Utama

PENAJAM - Fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung perlu ditingkatkan. Khususnya terkait kapasitas ruangan yang harus jadi prioritas utama, agar dapat menampung pasien dengan jumlah banyak.

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, Kamis (13/03/2025).

"Sektor kesehatan kita memang dinilai masih kurang, salah satunya mencakup soal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan ketersediaan ruang rawat inap belum mencukupi," katanya.

Keterbatasan fasilitas kesehatan tidak hanya menjadi keluhan masyarakat setempat, lanjut dia, tetapi juga menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam hasil pemeriksaan BPK, mengakui bahwa sektor layanan kesehatan di daerah yang berjudul Benuo Taka itu, masih dinilai kurang memadai dan perlu dilakukan peningkatan lagi.

"Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera mengambil tindakan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan khususnya di RSUD kita," ujarnya.

Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan permasalahan ini, jelas Sariman, Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu mencari dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan tambahan anggaran.

"APBD kita terbatas, jadi perlu berkomunikasi dengan provinsi maupun kementerian terkait, karena adanya temuan dari BPK kita mempunyai dasar kuat untuk mengajukan permohonan dana tambahan," tambahnya.

Politikus Partai PKS itu, meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Penajam Paser Utara untuk menjadikan peningkatan fasilitas kesehatan sebagai prioritas utama.

"TPAD dan DPRD harus menjadikan sebagai kebutuhan mendesak. Penambahan ruang inap pembangunan rumah sakit, dan fasilitas lainnya harus segera direalisasikan agar memastikan pelayanan kesehatan bisa optimal untuk masyarakat," terangnya.

Sariman menyatakan, akan mendukung penuh terhadap pembangunan gedung lima lantai pada RSUD Ratu Aji Putri Botung yang kini telah direncanakan sebelumnya.

"Layanan kesehatan harus menjadi skala prioritas, jadi adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, diharapkan fasilitas kesehatan di PPU semakin memadai dan mampu melayani masyarakat dengan baik," pungkasnya. (Darmawan)

Disnakertrans PPU: Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja

PENAJAM - Menjelang Idulfitri 1446 H, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan 124 perusahaan yang beroperasi di wilayah yang berjudul Benuo Taka Itu untuk memenuhi kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban perusahaan dalam memberikan THR kepada pekerja atau buruh.

"Perusahaan harus membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri," ucap Kepala Disnakertrans PPU Marjani kepada Katakaltim, Kamis (13/03/2025).

Disnakertrans PPU telah mengedarkan surat imbauan kepada perusahaan melalui grup komunikasi

untuk memastikan, bahwa perusahaan dapat memahami kewajiban tersebut.

Dalam surat edaran tersebut, kata dia, bahwa pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sementara, pekerja yang belum genap satu tahun masa kerja akan menerima THR secara proporsional dengan perhitungan: (masa kerja/12) x satu bulan upah.

Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi, lanjut dia lagi, Disnaker-

trans PPU akan membuka posko pengaduan di depan kantor mereka. Posko ini diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam mendapatkan THR dari perusahaan tempat mereka bekerja.

"Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan, pekerja bisa langsung melapor ke kami. Kami akan berkoordinasi dengan Dis-

nakertrans Kaltim untuk menindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya THR bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan dan persiapan Idulfitri.

"Kami berharap semua perusahaan dapat memenuhi kewajibannya agar hak pekerja terpenuhi. THR ini sangat membantu pekerja, terutama di momen penting seperti Idulfitri," pungkasnya. (Darmawan)



Marjani
(Kadisnakertrans
PPU)

Diskoperindag Uji Tera Ulang BBM di SPBU Tanjung Redeb

BERAU - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), melakukan uji tera ulang Bahan Bakar Minyak (BBM), di SPBU Bujangga, Tanjung Redeb, Rabu (12/03/2025).

Kegiatan uji tera ulang ini dalam rangka memastikan, takaran BBM yang dijual sesuai dengan interval yang ditetapkan oleh regulasi yang ada.

Kabid Usaha Diskoperindag, Hotlan Silalahi menyampaikan pihaknya telah melakukan uji tera sejak lima hari lalu di seluruh SPBU yang ada di Tanjung Redeb.

"Kami melakukan pengawasan ini, sejak lima hari yang lalu di SPBU yang ada di Tanjung Redeb. Kami juga melakukan pengecekan pola pendistribusian yang bersubsidi, saya tanyakan kemarin apakah masih boleh melayani pengisian dua kali sehari, namun ternyata by aplikasi tidak boleh lagi," kata Hotlan.

Diskoperindag juga melakukan uji tera di sejumlah pertashop. Kata Hotlan, pihaknya tidak menemukan masalah dalam uji tera yang dilakukan. Rata-rata tera yang dimiliki SPBU masih diambang batas interval yang diperbolehkan.

"Kami juga melakukan uji tera di pertashop yang ada di jalan murjani dan durian tiga. Hasilnya normal



PENGAWAS Kemeterologian Diskoprindag Berau saat melakukan uji tera di SPBU Bujangga, Tanjung Redeb, Rabu (12/03/25).
(ft. Asrin/katakaltim)

juga tidak ada permasalahan, masih di interval batas yang di perbolehkan," ungkapnya.

Terkait ambang batas interval tera BBM yang masih dalam batas wajar, Hotlan menyebutkan SPBU atau Pertashop yang menjual bahan bakar setidaknya 50 Mililiter, apabila lebih dari angka tersebut, maka bisa dipastikan melanggar.

"Jadi ada perhitungannya, nilai

yang ada dikeluarkan oleh nozzle (perangkat yang berfungsi mengatur aliran BBM), dan maksimal 50, kalau diatas 50 berarti itu sudah kelewatan," jelasnya.

Dari data hasil uji tera yang dilakukan dalam pengawasan beberapa hari terakhir di SPBU, nantinya akan diserahkan kepada unit meterologi, apabila ada temuan yang melebihi batas interval yang ditetapkan.

"Kalau ada temuan pada saat uji tera. Data ini kami akan serahkan ke unit meterologi supaya di tera ulang," ungkapnya.

"Bagi seluruh pengusaha ketika sudah ada temuan, maka tidak boleh menjual, ia harus tutup sementara hingga SPBU nya ditera ulang. Namun karena tidak ada temuan, jadi kami hanya mengimbau, untuk jangan sampai melewati ambang batas," pungkasnya. (Asrin)

HMI Temukan Sejumlah Pelanggaran PT Berau Coal

BERAU — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Berau Coal.

Investigasi tersebut berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025, menemukan beberapa indikasi pelanggaran di 2 lokasi, Perumahan Griya Salam di Jalan Sultan Agung dan Kampung Gurimbang.

Dalam investigasinya, HMI Cabang Berau menemukan bahwa aktivitas penambangan oleh PT. Berau Coal terlalu dekat pemukiman warga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012, aktivitas pertamban-

gan harus berjarak minimal 500 meter dari kawasan pemukiman. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan jarak antara lokasi penambangan dengan pemukiman hanya sekitar 15-20 meter. Ini menunjukkan PT. Berau Coal telah menabrak regulasi.

"Itu tidak sampai 500 meter. Bahkan hanya sekitar 15 hingga 20an meter," ujar perwakilan HMI Cabang Berau dalam keterangannya yang diterima Katakaltim, Jumat 14 Maret 2025.

Selain di Perumahan Griya Salam, tim investigasi HMI juga menemukan dugaan pelanggaran di Kampung Gurimbang. Beberapa pa isu yang mencuat yakni, Tukar guling jalan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau; Du-



HMI Berau melakukan investigasi dan menduga PT Berau Coal menabrak regulasi.
(Dok: syam/katakaltim)

gaan adanya kesepakatan antara PT Berau Coal dan pemerintah daerah terkait pertukaran jalan yang memicu pertanyaan mengenai transparansi dan kepentingan

masyarakat. Juga ada isu aAktivitas penambangan dekat pemukiman, Seperti halnya di Griya Salam, tim investigasi menemukan aktivitas

pertambangan juga terlalu dekat dengan kawasan pemukiman warga.

HMI juga menemukan fakta penggunaan jalan kabupaten untuk kepentingan tambang; Berdasarkan Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2012, perusahaan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan jalan umum untuk kepentingan usahanya.

Kata mereka, perusahaan harusnya membangun flyover atau underpass guna mendukung aktivitas pertambangan. Namun, dalam investigasi di lapangan, HMI Cabang Berau hanya menemukan satu conveyor yang melintas di atas jalan umum.

"Jadi ini belum memenuhi

ketentuan Perda," jelasnya.

Atas temuan ini, HMI Cabang Berau mendesak pemerintah daerah dan instansi berwenang, untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PT. Berau Coal. juga menuntut transparansi dalam kebijakan terkait pertambangan, khususnya yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

"Kami berharap pemerintah dan pihak berwenang segera mengambil langkah tegas terhadap temuan ini," tegasnya.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari aktivitas pertambangan yang tidak sesuai regulasi," pungkasnya. (Syam)